

## **MASYARAKAT MADANI DAN IDEOLOGI DALAM PENERJEMAHAN: SEBUAH PERSPEKTIF INTERDISIPLINER**

**Karnedi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka  
[karnedi@ut.ac.id](mailto:karnedi@ut.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Istilah Civil society ‘masyarakat madani’ atau ‘masyarakat sipil’ atau ‘masyarakat kewargaan’ termasuk ranah ilmu politik yang mengacu pada sebuah masyarakat yang ideal yang berbudaya, maju, dan modern. Setiap warga memiliki kesadaran yang tinggi tentang hak dan kewajibannya. Namun, bagaimana padanan terminologi itu diciptakan dalam bahasa Indonesia belum banyak dibicarakan orang. Makalah ini mencoba membicarakan tentang relasi ideologis berbagai istilah dalam domain Civil society khususnya dalam budaya politik Barat dengan padanan istilah yang sering digunakan dalam budaya politik di Indonesia. Dengan kata lain, analisis interdisipliner dalam makalah ini difokuskan pada kajian penerjemahan teks tentang Civil society dari bahasa asing ke bahasa Indonesia serta implikasi ideologisnya dalam perpolitikan di Indonesia. Data berupa teks dikumpulkan dari beberapa buku teks tentang Civil society dalam bahasa Inggris dan padanannya dalam bahasa Indonesia. Analisis teks dalam makalah ini menunjukkan bahwa pemilihan sejumlah padanan istilah yang terkait dengan domain Civil society dalam bahasa Indonesia mencerminkan ideologi penerjemahan yang dianut oleh penerjemah: apakah foreignization, yaitu sebuah ideologi yang lebih berorientasi pada bahasa dan budaya sumber ataukah domestication, yaitu ideologi yang berorientasi pada bahasa dan budaya sasaran. Temuan analisis teks dalam makalah ini turut memperkuat teori Civil society ‘masyarakat madani’ atau ‘masyarakat sipil’ atau ‘masyarakat kewargaan’ serta ideologi dalam penerjemahan teks dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.*

**Kata kunci:** masyarakat madani, ideologi penerjemahan

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah konsep, ‘masyarakat madani’ merupakan sebuah padanan yang dipilih dan digunakan dalam berbagai wacana bidang sosiologi berbahasa Indonesia, di samping sejumlah padanan yang lain. Penelitian kebahasaan, khususnya kajian penerjemahan yang melibatkan penerjemahan teks dari bahasa Inggris (sebagai bahasa sumber) ke bahasa Indonesia (sebagai bahasa sasaran), dengan latar belakang sosio-historis pembentukan istilah ‘madani’ sangatlah menarik, relevan, dan penting guna mengkaji kecenderungan pemilihan padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia yang sekaligus mencerminkan ideologis penerjemahan yang diadopsi oleh pencipta atau pengguna istilah itu dalam berbagai wacana sosiologi dan politik. Dengan kata lain, makalah ini menyajikan sebuah analisis komparatif yang melibatkan bahasa sumber, khususnya istilah *Civil society* dalam wacana, dan bahasa sasaran guna menginterpretasikan muatan ideologis penerjemahannya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Definisi *Civil society* vs ‘Masyarakat Madani’

Secara etimologis, frasa *masyarakat sipil* merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, *Civil society* yang diserap dari bahasa Latin *civilis societas*. Istilah *Civil society* pertama kali digunakan oleh Adam Ferguson (1723–1816) dalam sebuah tulisannya yang berjudul “An Essay on History of Civil Society” (1767).

Konsep *Civil society* kemudian dikembangkan oleh beberapa filsuf yang lain sehingga kemudian melahirkan beberapa teori tentang konsep *Civil society* itu sendiri. Karni dalam Baso (1999) mencoba merangkum lima teori *Civil society* yang berkembang dalam budaya Barat.

Hobbes dan Locke, misalnya, menganggap *Civil society* sebagai salah satu upaya bagi penyelesaian sekaligus peredam konflik antar kelompok masyarakat, sebuah misi yang biasanya diemban oleh negara.

Di samping itu, Ferguson memandang *Civil society* sebagai sebuah upaya alternatif yang menjunjung tinggi tanggung jawab dan merupakan alat perekat sosial sehingga berbagai konflik dalam masyarakat dapat diselesaikan. Pada sisi lain, Paine melihat *Civil*

*society* yang berfungsi untuk membatasi ruang gerak negara. Hegel berpandangan bahwa *Civil society* merupakan sebuah entitas yang menggantungkan nasibnya pada negara dalam hal penyediaan instrumen hukum dan administrasi. Pandangan senada yang ingin melemahkan *Civil society* juga dikemukakan oleh Marx. Ia ingin melenyapkan *civil society*, sebuah masyarakat yang tidak mengenal kelas sosial.

Gramsci merupakan tokoh lain yang memiliki pandangan yang hampir sama dengan Marx. Namun, Gramsci lebih menyoroti peran *Civil society* sebagai kekuatan pengimbang di luar kekuatan negara. Oleh karena itu, pandangannya itu lebih berdimensi ideologis. Pandangan Gramsci diperluas lagi oleh Habermas yang dikenal dengan konsepnya *the free public sphere* 'ruang publik yang bebas' yang memberikan akses seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk dapat melibatkan diri dalam setiap kegiatan publik.

Tocquville menyoroti peran *Civil society* yang dapat mengimbangi kekuatan negara yang sering kali berlebihan. Dengan kata lain, konsep *Civil society* yang bermula dari daratan Eropa pada abad ke-17 M itu memiliki sebuah misi, yaitu ingin membebaskan diri (warga negara) dari pengekangan yang dilakukan oleh para rohaniwan dan para penguasa, dalam hal ini raja.

Dalam "Glosarium Istilah Asing-Indonesia (2006), diberikan beberapa pilihan padanan untuk istilah *civil society*, tergantung pada bidang ilmu yang melatarinya. Misalnya dalam bidang Sosiologi, istilah *Civil society* dipadankan dengan dua alternatif padanan, yaitu *masyarakat madani* dan *masyarakat sipil*, masing-masing digunakan secara sengaja oleh penulis dengan cara pandang atau ideologi tertentu (*world dview*). Dalam ilmu Politik, padanan *masyarakat sipil* sengaja dipilih untuk mengkontraskannya dengan istilah *militer*. Dalam Filsafat, istilah yang sama dipadankan dengan istilah *kelompok masyarakat*. Bahkan, ada juga yang lebih memilih menggunakan istilah aslinya dalam bahasa Inggris, yakni *Civil society* dengan alasan-alasan tertentu. Dengan kata lain, melalui analisis strategi penerjemahan, kecenderungan dalam memilih padanan tertentu dapat mencerminkan posisi penulis teks atau pembicara dalam mengikapi atau mekanai fenomena sosial-politik yang berkembang.

Istilah *masyarakat madani* pertama kali diperkenalkan oleh Dato Anwar Ibrahim mantan Menteri Keuangan dan Asisten Perdana

Menteri Malaysia dalam sebuah simposium (1995) dengan judul “Islam dan pembentukan Masyarakat Madani”. Tidak seperti halnya istilah-istilah yang lain, istilah *masyarakat madani* bukan diciptakan oleh ahli bahasa/penerjemah, politikus, sosiolog melainkan oleh seorang pejabat pemerintah meskipun dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan dalam sebuah temu ilmiah. Penggunaan istilah yang dimaksud kemudian lebih dipopulerkan lagi oleh sejumlah intelektual muslim di Indonesia. Misalnya Nurcholish Madjid yang berpendapat bahwa konsep *madaniyyah* mengacu pada sebuah masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban, Emil Salim, dan Amien Rais. Bahkan, sejumlah politikus seperti B. J. Habibie, Wiranto, dan SBY juga ikut mempopulerkan istilah tersebut dalam konteks sosio-politik di Indonesia.

### **Ideologi dalam Penerjemahan**

Melalui karya terjemahan, perspektif ideologis yang dianut oleh seorang penerjemah sering dapat diamati, terutama ketika bersentuhan dengan budaya sumber dan bahasa sumber. “Posisi” atau strategi penerjemahan yang dipilih boleh jadi lebih berorientasi pada BSA yang dikenal *domesticating strategies of translation/domestication*, atau lebih menunjukkan keberpihakan pada budaya sasaran dan bahasa sasaran yang disebut dengan *foreignizing strategies of translation/foreignization* (Penrod 1993), seperti yang dikutip oleh Fawcett dan Munday (2009, h. 138). Namun, batasan kedua dikotomi itu telah ditinjau ulang oleh beberapa pakar di bidang kajian penerjemahan. Misalnya Venuti (1995a/1998b) mengkritik penerapan strategi penerjemahan di Amerika yang lebih didominasi oleh unsur-unsur budaya Anglo-Amerika. Dengan kata lain, perdebatan seputar penerapan strategi penerjemahan, terutama dalam konteks penerjemahan harfiah (*literal translation*) yang pengontrolan terhadap makna bersifat normatif sangat diutamakan. Penerjemahan bebas (*free translation*) cenderung dilandasi oleh motif ideologis: apakah bermotifkan agama atau terkait dengan kebijakan internal penerbit tertentu. Kecenderungan ideologis para pemangku kepentingan dalam industri penerjemahan antara lain dapat ditelusuri pada bagian kata pengantar dan daftar pustaka sebuah karya terjemahan, serta dalam materi pendukung lainnya (Baker 2006a/2007), seperti yang dikutip oleh Fawcett dan Munday (2009, h. 138–139).

Batasan ‘ideologi’ dalam penerjemahan yang dijadikan acuan dalam disertasi ini mengacu pada definisi ideologi menurut beberapa pakar penerjemahan, yaitu Mason (1992) (1992), Hatim dan Mason (1997), dan Van Dijk (1998, h. 6), seperti yang dikutip oleh Al-Mohannadi (2008, h. 529–542), termasuk Tymoczko 2003 seperti yang dikutip oleh Munday (2007, h.197).

*Empirical studies must seek not to contrast disembodied entities or isolated phrases from the source text and target text but to trace generic, discursual and textual developments which reveal ideologies and highlight the mediating role of the translator* (Mason 1992, h. 34).

*A body of assumptions which reflects the belief and interest of an individual, a group of individuals, a social institution, etc. and which ultimately find expression in language* (Hatim dan Mason 1997, h. 218).

*If we want to know what ideologies actually look like, how they work, and how they are created, changed and reproduced, we need to look closely at their discursive manifestations* (Van Dijk 1998, h. 6).

*The ideology of a translation resides not simply in the text translated, but in the voicing and stance of the translator, and in its relevance to the receiving audience. These latter features are affected by the place of enunciation of the translator: indeed they are part of what we mean by the ‘place’ of enunciation, for that ‘place’ is an ideological positioning as well as geographical or temporal one.* (Tymoczko 2003)

Keempat kutipan tersebut di atas melihat ideologi dalam kaitannya dengan kajian penerjemahan sebagai sebuah penelitian empiris sebab didasarkan pada data (subkorpus TSu dan subkorpus TSa) serta peran mediasi penerjemah sebagai individu yang memiliki kepentingan yang sekaligus mencerminkan cara pandang mereka (*worldview*) terhadap terjemahan sebagai manifestasi dari teks atau wacana. Di sisi lain, konsep ‘benar’, ‘berterima’, dan ‘baik’ dalam penerjemahan sangat ditentukan oleh tujuan [*skopos*] penerjemahan itu sendiri: apakah berorientasi pada BSu (ideologi *foreignization*) ataukah berorientasi pada BSa (ideologi *domestication*)? Hoed (2003, h. 11) menggarisbawahi sikap kita/penerjemah terhadap kedua dikotomi ideologi dalam penerjemahan yaitu *domestication* dan *foreignization*, khususnya dalam konteks penerjemahan teks dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, seperti yang terlihat pada kutipan berikut.

... ideologi dalam penerjemahan dalam masyarakat kita menjadi pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pembaca [*needs analysis*]. Dalam hal ini, sikap kita seharusnya terbuka pada kedua ideologi yang saya kemukakan di atas. Keduanya dapat memberikan dampak positif atau pun negatif karena akhirnya karya terjemahan berperan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## METODOLOGI

Makalah ini menerapkan metode kualitatif (Travers 2001, h. 4–5; William & Chesterman 2002, h. 64–65) berupa analisis teks (*textual analysis*) dalam bentuk studi kasus. Metode penelitian yang dimaksud digunakan untuk menjelaskan bagaimana terminologi yang terkait dengan *Civil society* diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Analisis komparatif yang didasarkan pada model komparatif ( $TSu \approx TSa$  atau  $TSa \approx TSu$ ). Data yang dianalisis bersumber dari beberapa sumber, termasuk dari Internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dipaparkan analisis penerjemahan istilah *Civil society* dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Analisis yang dimaksud bertujuan untuk mengkaji ideologi penerjemahan yang diadopsi oleh penerjemah ketika menerjemahkan teks tentang *civil society*. Untuk keperluan analisis, telah dicuplik tiga paragraf yang berasal dari teks sumber dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Paragraf TSu (1) menjelaskan tentang batasan *civil society*, sedangkan paragraf TSa (1) adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang tersedia di Internet dengan sedikit perubahan.

TSu (1):

*Civil society* is composed of the totality of voluntary social relationships, civic and social organizations, and institutions that form the basis of a functioning society, as distinct from the force-backed structures of a state (regardless of that state's political system) and the commercial institutions of the market. Together, state, market and *Civil society* constitute the entirety of a society, and the relations between these three components determine the character of a society

and its structure. ([http://en.wikipedia.org/wiki/Civil\\_society\\_tgl\\_03/07/2011](http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society_tgl_03/07/2011))

TSa (1):

*Masyarakat sipil* terdiri dari totalitas hubungan sosial yang bersifat sukarela, organisasi sipil dan sosial, dan lembaga yang membentuk dasar bagi masyarakat berfungsi, yang berbeda dari struktur yang didukung oleh kekuatan sebuah negara (terlepas dari sistem politik negara) dan institusi komersial pasar. Negara, pasar, dan *masyarakat sipil* secara bersama membentuk keseluruhan masyarakat, dan hubungan antara ketiga komponen itu menentukan karakter masyarakat dan strukturnya (terjemahan dengan perubahan).

Berdasarkan padanan yang dipilih pada TSa (1), diketahui bahwa istilah *Civil society* diterjemahkan menjadi *masyarakat sipil*, termasuk padanan 'organisasi sipil dan sosial' dan 'sistem politik'. Pemilihan padanan itu, dengan pangkalan data yang sangat terbatas pada Wikipedia, mencerminkan posisi ideologis penerjemah yang bersangkutan yang lebih berorientasi pada bahasa Inggris sebagai bahasa sumber. Dengan kata lain, penerjemah mengadopsi ideologi *foreignization*, sebuah ideologi penerjemahan yang ingin mempertahankan ciri teks sumber dalam teks terjemahan atau teks sasaran.

Analisis penerjemahan TSu (2) menjadi TSa (2) juga memperlihatkan sebuah bukti empiris bagaimana ideologi *foreignization* telah diadopsi. Misalnya pemilihan padanan *civil society*, *filantropi*, *kolonialisme*, dan *feminism*, *partisipasi warga* dan *ruang publik*. Semua padanan itu masih benuasa bahasa dan budaya sumber, dalam hal ini budaya Barat meskipun telah mengalami penyesuaian sitem pelafalan dan ejaan bahasa Indonesia.

TSu (2):

The essays in *Women, Philanthropy, and Civil society* illustrate the extent to which government, the market, religion, colonialism, and feminism have shaped the role of female philanthropy and philanthropists in different national settings. By shifting the focus from organizations to donors and volunteers, the authors assess the relative importance of each of these factors in creating opportunities for citizen participation, as well as the role of female philanthropy in

opening a space for women in the public sphere ([http://www.iupress.indiana.edu/product\\_info.php?products\\_id=20027](http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=20027) tgl 03/07/2011).

TSa (2):

Esai-esai dalam *Wanita, Filantropi, dan Civil society* menggambarkan sejauh mana pemerintah, pasar, agama, kolonialisme, dan feminisme telah membentuk peran filantropi perempuan dan dermawan dalam konteks nasional yang berbeda. Dengan menggeser fokus dari organisasi pada donor dan sukarelawan, penulis menilai pentingnya setiap faktor secara relatif dalam menciptakan peluang bagi partisipasi warga, serta peran dalam filantropi perempuan untuk membuka ruang bagi perempuan di ruang publik (terjemahan dengan perubahan).

Sebaliknya, fenomena penerjemahan TSu (3) menjadi TSa (3) sangat menarik untuk dikaji. Istilah *Civil society* telah diterjemahkan menjadi 'masyarakat madani'. Secara sepintas, padanan itu berorientasi bahasa sasaran sebab istilah 'masyarakat madani' telah dibakukan dalam bahasa Indonesia sehingga tidak lagi bernuasa asing. Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, padanan itu sesungguhnya berasal dari bahasa asing ketiga, dalam hal ini bahasa Arab. Kata *madani* berasal dari kata *madaniyah* atau dengan kata *madinah*, sebuah nama kota di jazirah Arab yang memiliki latar belakang historis-religius yang sangat penting dalam Islam. Konsep 'masyarakat madani' dalam budaya Arab menggunakan istilah *al-mujtama' al-madani*. Pendek kata, padanan 'masyarakat madani' pun sesungguhnya masih berorientasi pada bahasa sumber atau bahasa asing kedua sehingga dapat dikatakan bahwa penerjemah juga telah mengadopsi ideologi *foreignization*. Dengan ideologi yang dimaksud, penerjemah atau pengguna istilah itu ingin "menghadirkan" karakteristik dan makna teks sumber yang bernuasa atau memiliki pesan religious dalam teks sasaran.

TSu (3):

*Civil society* faces huge question marks as both a theory and a vehicle for social change, but I think it is precisely its flexibility and openness that makes it useful as a framework for exploring the great questions of the day, a function *Civil society* has performed since the days of the Ancient Greeks – the nature of the good society, the rights and



responsibilities of citizens, the practice of politics and government, and how to live together peacefully by reconciling our individual autonomy with our collective aspirations, balancing freedom and its boundaries, and marrying pluralism with conformity so that complex societies can function with both efficiency and justice. And because the essence of *Civil society* is collective action – in associations, through the public sphere, and across society – the debate that has grown up around this term reminds us that individual efforts and experiences can never substitute for the relationships of

love, solidarity, sacrifice and friendship that are the essence of our true human nature. At a time when such relationships are severely strained by broader changes in society, international relations and the economy, this may be the most important lesson that *Civil society* has to teach (Michael Edwards 2004)

TSa (3):

Sebagai sebuah teori maupun sarana bagi perubahan sosial, *masyarakat madani* menghadapi tanda tanya besar. Namun, saya pikir faktor fleksibilitas dan keterbukaan yang terkandung di dalamnya yang membuatnya bermanfaat sebagai sebuah kerangka kerja untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan besar dewasa ini. Sebuah fungsi *masyarakat madani* telah dilakukan sejak zaman Yunani Kuno, yakni sifat dari masyarakat yang baik, hak dan tanggung jawab warga negara, praktik politik dan pemerintahan, serta bagaimana hidup bersama secara damai dengan cara mendamaikan otonomi individu dengan aspirasi kolektif kita, menyeimbangkan kebebasan dengan batas-batasnya, dan pluralisme dengan nilai tradisional sehingga masyarakat yang kompleks dapat berfungsi secara efisien dan adil. Mengingat esensi *masyarakat madani* adalah tindakan kolektif melalui asosiasi, ruang publik, dan masyarakat, perdebatan yang telah berkembang di seputar istilah itu mengingatkan kita bahwa upaya individu dan pengalaman tidak pernah dapat menggantikan hubungan cinta, solidaritas, pengorbanan, dan persahabatan yang merupakan esensi dari hakikat manusia. Ketika hubungan itu sangat tegang karena perubahan besar dalam masyarakat, hubungan internasional dan ekonomi, pelajaran paling penting yang dapat dipetik adalah bahwa *masyarakat madani* harus memberi contoh (diterjemahkan oleh penulis).

## SIMPULAN

Konsep *Civil society* dengan *masyarakat madani* memiliki latar belakang sosio-historis berbeda. Secara ontologis, istilah ‘masyarakat madani’ memiliki ideologi penerjemahan *foreignization* yang bersifat religius. Masyarakat madani menekankan nilai-nilai: demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi (Usman 2002, Zاتمiko). Di antara nilai-nilai itu, masyarakat yang demokratis (demokrasi) merupakan yang paling menonjol.

Analisis teks dalam makalah ini menunjukkan bahwa pemilihan sejumlah padanan istilah yang terkait dengan domain *Civil society* dalam bahasa Indonesia (*masyarakat madani*, *masyarakat sipil*, *civil society*) mencerminkan sebuah ideologi penerjemahan yang dianut oleh penerjemah, yakni ideologi *foreignization* yang lebih berorientasi pada bahasa dan budaya sumber atau bahasa asing. Temuan analisis teks dalam makalah ini turut memperkuat teori *Civil society* ‘masyarakat madani’ atau ‘masyarakat sipil’ atau ‘masyarakat kewargaan’ serta teori ideologi dalam penerjemahan teks dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Al-Mohannadi, S. (2008). *Translation and ideology*. Social Semiotics 18(4), 529–542.
- “Civil society”. Diakses dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Civil\\_society#Definition](http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society#Definition) tgl 31/05/2011.
- Edwards. M. (2004). *Civil society*. Cambridge: Polity Press
- Fawcett, P., & Munday, J. (2009). Ideology. Dalam Baker, M. (Ed.). *Routledge encyclopedia of translation studies* (h. 137–140). London: Routledge.
- Hatim, B., & Mason, I. (1997). *The translator as communicator*. London: Routledge.

- Hoed, B. H. (2003, September). *Ideologi dalam Penerjemahan*. Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Penerjemahan, Tawangmangu.
- Mason, I. (1992). *Discourse, ideology, and translation*. Dalam de Beaugrande, A., & Heliel, M.H. (Eds.). *Language, discourse and translation in the West and Middle East*. Amsterdam: John Benjamins.
- Suharto, E. "*Masyarakat madani: Aktualisasi profesionalisme community workers dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan*". Diakses dari [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_16.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16.htm) tgl 20/06/2011.
- Tagela, U. "*Civil society*" dan demokrasi, untuk apa? Diakses dari <http://mesa85.wordpress.com/2009/04/13/civil-society-dan-demokrasi-untuk-apa/> tgl 31/05/2011
- Usman, H. *Hakikat masyarakat mandani (civil society)*. Makalah disajikan pada Orasi Ilmiah dalam Pembentukan HIMA Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat (PSM) STKS Bandung, Senin 21 Oktober 2002.
- Van Dijk, T.A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary Approach*. London: Sage.
- Venuti, L. (1995). *The translator's invisibility*. London: Routledge.
- Zatmiko, D. "Konsep Civil society dan masyarakat madani, apakah sepadan?" Diakses dari [http://www.mitimahasiswa.com/berita-75-konsep\\_civil\\_society\\_dan\\_masyarakat\\_madani\\_\\_apakah\\_sepadan\\_\\_\\_bag.\\_1\\_dari\\_2\\_.html](http://www.mitimahasiswa.com/berita-75-konsep_civil_society_dan_masyarakat_madani__apakah_sepadan___bag._1_dari_2_.html) tgl 31/05/2011